

## DAFTAR PUSTAKA

- 02/PMK. 03/ 2010. (n.d.). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK. 03/ 2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.*
- 540/KMK.010/2020. (n.d.). *Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga.*
- Darmayanti, N. (2012). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(3), 29–44.
- Firdausy, C. M. (2021). *Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fitriya. (2024, October 17). *Pajak Pertambahan Nilai dan Regulasi Tarif PPN 12 Persen 2025*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/>
- Geruh, M. R. (2013). Penerapan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Hidayat, R., & Cheisviyanny, C. (2013). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggalan Pajak. *Wahana Riset Akuntansi*, 1(1), 1–20.
- Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan. (2025). *Penerimaan Pajak Terhadap Total Penerimaan Negara 2019-2023*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/realisasi-apbn.html>
- Maulana, Y. (2020). Ekualisasi Laporan Keuangan Dengan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Sebagai Dasar Penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. *Syntax*, 2(11), 975.
- Maulida. (2024, July 26). *PPN: Pengertian, Tarif & Jenis Barang yang Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai*. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-ppn-adalah>
- Maulida, Y. I., Sulistyowatie, S. L., & Amelia, R. W. (2023). Faktor-Faktor Terbitnya Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan atau Keterangan (SP2DK) (SP2DK)(Studi Kasus Kantor Umatun Markhumah Tax Consulting). *Widya Dharma Journal of Business-WIJoB*, 2(02), 114–123.
- PMK.03/No 243/2014. (n.d.). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*. <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/243~PMK.03~2014Per.HTM>
- PP No 55 Tahun 2022. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*.

SE-10PJ2017. (n.d.). *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.*

SE - 39/PJ/2015. (n.d.). *Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.*

UU No 7 Tahun 2021. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

UU No 36 Tahun 2008. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.* Retrieved March 3, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>

UU Nomor 42 Tahun 2009. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*

Zidane, E. M., & Widajantie, T. D. (2024). Penyebab dan Penyelesaian SP2DK Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Studi Kasus Terhadap Klien KKP XYZ. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2437–2445.